

---

## **PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA (PSPB) SEBAGAI MATA PELAJARAN PADA MASA ORDE BARU**

Dha Widhi Witir

Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia

[dhawidhiwitir@unsil.ac.id](mailto:dhawidhiwitir@unsil.ac.id)

### **Abstrak**

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) merupakan salah satu mata pelajaran yang berada dalam Kurikulum 1984. Artikel ini bertujuan membahas mengenai PSPB sebagai salah satu mata pelajaran pada masa Orde Baru. Artikel ini disusun dengan metode penelitian sejarah, meliputi penentuan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan. Adapun pembahasan dalam artikel ini terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), (2) latar belakang hadirnya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), (3) praktik pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), dan (4) penghapusan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

**Kata Kunci:** mata pelajaran, orde baru, pendidikan, PSPB

### **Abstract**

*History of the Nation's Struggle Education (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa or PSPB) was one of the subjects implemented in the 1984 Curriculum. This article aims to discuss PSPB as a mandatory subject during the New Order era. The study was conducted using the historical research method, which includes topic selection, heuristic (source collection), source verification, interpretation, and historiography (writing). The discussion in this article covers several aspects, namely: (1) the nature of the History of the Nation's Struggle Education (PSPB) subject, (2) the background behind the introduction of PSPB, (3) the pedagogical practices and implementation of PSPB, and (4) the dissolution of the PSPB subject.*

**Keywords:** subject, new order, education, PSPB

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat proses transfer ilmu pengetahuan, transformasi nilai, dan pembentukan suatu kepribadian dengan segala macam aspek yang dicakupnya. Maka, tidak berlebihan apabila pendidikan merupakan suatu hal yang lebih daripada sekadar kegiatan pengajaran yang berorientasi kepada pembentukan suatu spesialis pada bidang tertentu saja. Pendidikan mengedepankan suatu pembentukan kesadaran dan kepribadian selain proses transfer ilmu pengetahuan. Maka, terdapat aspek kognitif serta afektif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendidikan dimaknai bukan hanya untuk membantu proses berpikir saja, tetapi juga harus terdapat unsur yang berkaitan dengan perasaan (Nurkholis, 2013).

Pendidikan pada dasarnya senantiasa terkait dengan persoalan yang bersifat politis. Berbagai bentuk kebijakan pendidikan juga merupakan suatu bentuk keputusan politik. Kegiatan pembinaan dan

pengembangan dalam pendidikan di suatu negara merupakan suatu cermin dari berbagai kepentingan yang harus diperjuangkan oleh berbagai kepentingan kelompok yang saling bersaing dan berbagi kekuasaan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan atau kebijakan pendidikan dapat dipandang sebagai suatu bentuk perwujudan keputusan politik (Wibowo, 2011).

Pendidikan yang merupakan suatu bentuk dari keputusan politik dapat dicontohkan pada kebijakan pendidikan masa Orde Baru. Berbagai kebijakan pendidikan dikeluarkan untuk memperkuat hegemoni kekuasaan Orde Baru melalui kurikulum dan pembelajaran. Di samping itu, kegiatan pendidikan sarat dengan adanya upaya indoktrinasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang bertujuan melakukan pendidikan demokrasi, pluralisme, dan multikultural, tetapi bersifat hegemoni (Zulkarnain, 2013).

Sejarah juga mengalami suatu penyesuaian dalam rangka mendukung kepentingan Orde Baru dengan menjadi suatu subjek untuk menjalankan kepentingan politik dan upaya indoktrinasi dari pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Mata pelajaran tersebut dipandang merupakan suatu bentuk legitimasi dari perjuangan Orde Baru. Pada mata pelajaran PSPB, juga terdapat suatu bentuk penetapan kawan yang dipandang berasal dari kalangan militer yang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan lawan yang berasal dari kalangan ekstrem kiri dan ekstrem kanan (Adam, 2009). Di samping itu, PSPB bukanlah mata pelajaran sejarah satu-satunya pada Kurikulum 1984. Pada Kurikulum 1984, terdapat dua mata pelajaran sejarah, yaitu Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia (SNID) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) (Syafutra, 2016).

Perumusan PSPB dipengaruhi oleh tokoh kunci yang terkait dengan pemerintah Orde Baru. Salah satu tokoh utamanya adalah Nugroho Notosusanto yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983-1985. Nugroho Notosusanto melakukan berbagai bentuk perubahan dan inovasi pada sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, juga terdapat kontroversi terkait dengan banyaknya peran penguasa terkait penyajian materi sejarah. Salah satu kontroversi yang muncul adalah sifat pembelajaran yang dinilai subjektif dan mencerminkan kepentingan suatu kelompok saja (Syafutra, 2016). Apabila dilihat dari tujuan pembelajaran sejarah saat itu, sangat terlihat adanya muatan politis yang sejalan dengan pandangan pemerintah. Pandangan yang dimaksud adalah mutlak diperlukan adanya persatuan dan kesatuan, orde baru sebagai pemerintah harus didukung, sedangkan PKI adalah musuh yang harus dilawan (Purwanto & Adam, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan yang merupakan bagian dari persoalan politik. PSPB dapat menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas karena mata pelajaran tersebut dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang erat dengan persoalan politik dan bentuk upaya penguatan hegemoni Orde Baru. Oleh sebab itu, pada artikel ini akan secara komprehensif menguraikan mengenai mata pelajaran PSPB, latar belakang adanya mata pelajaran PSPB, praktik pembelajaran dalam mata pelajaran PSPB, serta penghapusan PSPB.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah karena topik pembahasan dalam artikel ini berhubungan dengan sejarah. Sejarah yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejarah mengenai mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang merupakan salah satu mata pelajaran pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian sejarah dengan lima tahapan yang dimulai dari: (1) Pemilihan topik untuk menetapkan topik yang menjadi fokus kajian; (2) Pengumpulan sumber baik sumber yang primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah dokumen dengan judul “Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran PSPB” yang diterbitkan oleh Depdikbud tahun 1984. Adapun sumber sekunder terdiri atas jurnal, buku, atau tulisan lain yang terbit sebelumnya berkaitan dengan PSPB; (3) Verifikasi sumber untuk memastikan terkait dengan keaslian sumber yang ada; (4) Interpretasi untuk menemukan makna berdasarkan data historis dari sumber yang telah dikumpulkan dan diverifikasi; (5) Penulisan, sebagai tahap terakhir untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)**

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) merupakan suatu mata pelajaran yang mulai efektif dilaksanakan dalam kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan lanjutan dari Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 hadir karena adanya suatu ketidaksesuaian antara kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat dan ilmu pengetahuan atau teknologi terhadap pendidikan dalam Kurikulum 1975. Oleh sebab itu, perubahan atau perbaikan kurikulum dilakukan (Agung S, 2015).

PSPB di tahun 1983 sebenarnya sudah dikategorikan sebagai mata pelajaran wajib. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani oleh Nugroho Notosusanto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. PSPB sebagai mata pelajaran yang wajib mendapatkan suatu kekuatan hukum berkat dikeluarkannya TAP MPR Nomor II/MPR/1983. Pada TAP MPR tersebut dijelaskan mengenai PSPB adalah suatu bagian dari pendidikan Pancasila (Nury Batubara & Aman, 2019). Dampak lain yang muncul adalah adanya pelaksanaan pembelajaran PSPB di seluruh tingkatan pendidikan, dari SD, SMP, dan SMA (Naredi, 2019).

PSPB sebagai suatu mata pelajaran memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari PSPB, meliputi: (1) Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air; (2) Meningkatkan pendidikan Pancasila; (3) Meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda; (4) Memberikan penekanan terhadap ranah sikap dan nilai yang mendorong kepada semangat, merangsang ilham, dan menyeimbangkan kepribadian. Upaya agar dapat mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menetapkan mata pelajaran PSPB sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Di

samping itu, PSPB juga ditetapkan sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan suatu bagian dari program pendidikan Pancasila dan program Inti (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Materi pada mata pelajaran PSPB secara umum dibuat dalam bentuk episode dalam periodisasi (Semiawan, 1983). Materi PSPB cenderung berisikan gambaran mengenai sejarah perjuangan bangsa yang lebih condong terhadap sejarah yang militeristik. Beberapa kata seperti kata perjuangan, pertempuran, perlawanan merupakan suatu istilah yang sering kali ditemui dalam materi pembelajaran. Adapun istilah lain yang berupaya ditanamkan ke dalam diri peserta didik, seperti istilah heroisme, patriotisme, rela berkorban dimulai dari perlawanan terhadap bangsa asing, masa pendudukan Jepang sampai proklamasi, serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mengherankan apabila terdapat suatu pandangan bahwa PSPB merupakan suatu sejarah yang membahas mendalam mengenai sejarah perang, konflik, kekerasan dan pertumpahan darah. Hal semacam itu dapat menimbulkan suatu bentuk kebencian terhadap bangsa lain yang di masa lalu melakukan kegiatan penjajahan kepada Indonesia (Naredi, 2019).

PSPB memiliki suatu dampak positif juga dalam pendidikan di Indonesia. Hal tersebut khususnya berdampak kepada persoalan penanaman nilai-nilai positif yang bersumber dari perjuangan Bangsa Indonesia. PSPB dapat digunakan sebagai mata pelajaran yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dan tokoh pendukung nilai yang terkait dengan menjadikannya sebagai model identifikasi terhadap idealisme yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, diharapkan PSPB menghasilkan suatu pembentukan kepribadian yang kuat dan tangguh, berwatak, memiliki harga diri, beradab, serta berbudaya (Daliman, 1985).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa hadirnya PSPB dalam Kurikulum 1984 bukan sekadar bentuk penyesuaian teknis. PSPB secara sengaja dirancang dalam rangka meneguhkan identitas nasional ala Orde Baru. Di samping itu, tidak dipungkiri bahwa PSPB bermanfaat dan berfungsi untuk menanamkan nilai heroisme, patriotisme, dan kesetiaan pada negara, meskipun upaya tersebut dilakukan dengan menonjolkan aspek militeristik dan konflik, sehingga menimbulkan kritik dan kontroversi. Meski begitu, tujuan positif dari PSPB untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepribadian kuat, beradab, dan menghargai nilai perjuangan tetap menjadi gagasan inti yang ingin diwujudkan melalui pembelajaran sejarah versi negara pada masa itu.

### **Latar Belakang Hadirnya Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)**

PSPB hadir karena adanya keinginan dari Soeharto yang pada Orde Baru menjabat sebagai presiden. Soeharto berkeinginan agar sejarah sebagai mata pelajaran tidak hanya mengajarkan mengenai pengetahuan kesejarahan saja. Akan tetapi, sejarah sebagai mata pelajaran penting juga untuk melakukan suatu bentuk penanaman nilai yang bersifat positif. Salah satu sumber nilai yang bisa diangkat adalah berasal dari perjuangan bangsa. Salah satu penyebab Soeharto memiliki keinginan yang seperti itu karena adanya pernyataan dan masukan dari Jenderal M. Yusuf yang menyatakan bahwa

calon taruna AKABRI memiliki pengetahuan yang dangkal mengenai sejarah perjuangan bangsa (Purwanto & Adam, 2013).

Berdasarkan keinginan dari Soeharto yang pada akhirnya menjadi PSPB sebenarnya merupakan suatu persoalan internal ABRI yang kemudian meluas menjadi persoalan nasional. Adapun proses penyiapan PSPB sebagai mata pelajaran selanjutnya ditugaskan kepada Moerdiono yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Nugroho Notosusanto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Hasan Walinono yang menjabat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hari Soeharto sebagai ketua BP7, dan Basuni Suryamiharja yang merupakan ketua PGRI untuk membahas rencana tersebut (Purwanto & Adam, 2013).

Sebagaimana kebijakan lain di masa Orde baru, PSPB memiliki suatu dasar hukum yang bersifat jelas (Purwanto & Adam, 2013). Pada perkembangannya, keluar GBHN 1983 yang berdampak kepada PSPB meskipun belum tercantum ke dalam kurikulum. Pada GBHN tersebut terdapat bunyi yang menyatakan bahwa PSPB merupakan suatu bagian dari Pendidikan Pancasila untuk meningkatkan suatu kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghadapi masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Adapun pada perkembangannya, PSPB mulai secara aktif dipelajari pada tahun 1984 (Semiawan, 1983).

Berdasarkan uraian tersebut, proses hadirnya PSPB sebagai mata pelajaran menunjukkan bahwa PSPB bukan merupakan bentuk kebijakan pendidikan biasa. PSPB bisa jadi merupakan kebijakan strategis Orde baru yang berangkat dari persoalan internal ABRI dan kemudian menjadi agenda nasional. Adanya dukungan dari berbagai tokoh yang kuat dan badan hukum menyebabkan PSPB dirancang untuk menanamkan nasionalisme, semangat dan nilai 1945, serta menumbuhkan kemampuan kreatif dan inovatif.

### **Praktik Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)**

Mata pelajaran PSPB sebenarnya telah mulai dilakukan pembelajarannya sejak tahun 1983. Akan tetapi, secara efektif pelaksanaannya baru berjalan pada tahun 1984 (Nury Batubara & Aman, 2019). Pembelajaran PSPB diselenggarakan di seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA (Naredi, 2019). PSPB merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, sehingga alokasi pembelajarannya dilakukan selama 2 jam pelajaran setiap minggu dalam lembaga pendidikan, tanpa adanya penambahan suatu jam pelajaran (Semiawan, 1983).

Berdasarkan buku “Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa”, kegiatan pembelajaran PSPB sebenarnya dilakukan dengan cara belajar siswa aktif (CBSA). Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengembangan sejumlah kemampuan dasar dari peserta didik yang sebenarnya belum berkembang. Kemampuan tersebut pada perkembangannya tidak dibina seluruhnya karena kondisi pembelajaran yang dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik diminta untuk memilih beberapa kemampuan dasar saja yang ingin dikembangkan.

Kemampuan yang dimaksud antara lain adalah kemampuan: (1) Bertanya; (2) Mengamati; (3) Menafsirkan; (4) Meramalkan; (5) Menerapkan; (6) Merencanakan penelitian; (7) Mengkomunikasikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Pelaksanaan pembelajaran dengan cara pembelajaran siswa aktif dalam pelaksanaan PSPB dapat dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang dapat digunakan berdasarkan buku “Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa”, meliputi: (1) Metode ceramah; (2) Metode bercerita; (3) Metode tanya jawab; (4) Metode diskusi; (5) Bermain peran; (6) Sosiodrama; (7) Pemberian tugas; (8) Karyawisata; (9) Metode proyek (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Kegiatan pembelajaran PSPB juga disarankan dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai sarana dan sumber belajar. Hal tersebut bertujuan dalam rangka membantu peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di samping itu, pemanfaatan sarana dan sumber belajar dapat memudahkan berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Berdasarkan buku “Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa” sarana dan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PSPB diklasifikasikan ke dalam jenis, meliputi: (1) Sarana cetak; (2) Alat peraga; (3) Sarana elektronik; (4) Lingkungan sebagai sumber belajar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Pelaksanaan pembelajaran PSPB tentunya membutuhkan suatu buku paket untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sebelum buku paket ada, buku yang digunakan sebagai buku pegangan dalam kegiatan pembelajaran PSPB adalah buku “30 Tahun Indonesia Merdeka”. Buku tersebut merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1975 dengan mayoritas penulis berasal dari Pusat Sejarah ABRI. Di samping itu, juga dimanfaatkan buku dengan judul “Sejarah Nasional Indonesia untuk SMU jilid III” yang disunting oleh Nugroho Notosusanto dan Yusmar Bahri. Keduanya memiliki latar belakang dari Pusat Sejarah ABRI (Purwanto & Adam, 2013).

Buku paket PSPB sebagai salah satu sarana pembelajaran pada perkembangannya dibuat dengan mengacu kepada buku dengan judul “Sejarah Nasional Indonesia”, khususnya jilid IV, V, VI dan buku dengan judul “30 tahun Indonesia Merdeka”. Buku teks PSPB dipandang memberikan suatu gambaran sejarah perjuangan Indonesia yang didominasi oleh kalangan militer. Tokoh utama dalam narasi sejarah yang ditampilkan cenderung mewujudkan sosok militer yang melawan musuh. Hal tersebut tidak mengherankan karena Orde Baru dapat menggunakan sekaligus mengendalikan berbagai kisah sejarah untuk legitimasi ideologi dan menanamkan nilai yang dianggap luhur kepada generasi bangsa. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa terdapat suatu dugaan bahwa di dalam teks sejarah pada masa Orde Baru terdapat berbagai makna dekonstruksi yang dapat diamati dari proyek narasi sejarah Indonesia menjadi militeristis setelah Seminar Angkatan Darat 1972 (Naredi, 2019).

Persoalan buku sebenarnya juga menimbulkan suatu kontroversi. Di Jawa Tengah pada saat itu menjadi suatu persoalan karena mata pelajaran PSPB ketika awal dilaksanakan belum memiliki buku pedoman, sehingga pembelajaran PSPB dilaksanakan sebagaimana inisiatif dari guru yang ada.

Terdapat tiga guru di Surakarta yang pada akhirnya membuat buku dengan judul “Kita Semua Bangsa yang Berjuang”. Buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pembina Keluarga, Surakarta pada Mei 1984. Rekomendasi Kanwil P dan K Jawa Tengah diberikan untuk pemanfaatan buku tersebut dalam pembelajaran. Akan tetapi, baru tiga bulan beredar buku tersebut dicabut karena dinilai tidak layak. Izin pemakaian buku pelajaran pada saat itu yang bukan edisi P dan K diharuskan keluaran dari oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen P dan K (Darmaningtyas, 2004).

Pelaksanaan PSPB menunjukkan bahwa meskipun dirancang dengan pendekatan siswa aktif dan didukung berbagai metode serta sumber belajar, praktiknya tetap didominasi narasi sejarah versi negara yang berorientasi militer. Buku-buku yang digunakan mayoritas disusun oleh Pusat Sejarah ABRI. Di sisi lain, adanya persoalan buku ajar di lapangan, seperti kasus yang terjadi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa standar pembelajaran pada saat itu belum matang dan dikendalikan oleh negara.

### **Penghapusan Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)**

Pelaksanaan PSPB pada Kurikulum 1984 ternyata mengalami suatu persoalan dengan mata pelajaran yang lain. Persoalan yang muncul adalah suatu persoalan di mana PSPB tumpang tindih dengan mata pelajaran IPS, Sejarah Nasional, dan PMP. Salah satu bentuk tumpang tindih terdapat dalam materi pembelajaran yang ketiganya membahas hal yang sama dalam satu jenjang pendidikan. (Darmaningtyas, 2004).

Pada perkembangannya, PSPB dihapuskan semenjak tahun 1994. Hal tersebut bertepatan dengan adanya pelaksanaan Kurikulum 1994. Alasan PSPB dihapuskan karena adanya pandangan bahwa aspek afektif yang menjadi penekanan dari PSPB tidak tercapai dalam praktiknya di lapangan. Di samping itu, terdapat suatu tendensi bahwa penghapusan PSPB karena adanya kritik dan protes terhadap PSPB. Oleh sebab itu, aspek sejarah dalam PSPB kemudian diintegrasikan dalam mata pelajaran Sejarah. Adapun aspek yang berhubungan dengan moral dan nilai diintegrasikan kepada mata pelajaran PKn (Purwanto & Adam, 2013).

Tidak tercapainya tujuan afektif dari PSPB dalam praktiknya di lapangan bisa saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan dalam pendidikan terdapat suatu keterkaitan dari unsur utama, yang meliputi pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, apabila tujuan pendidikan tidak tercapai dalam praktiknya di lapangan, bisa saja terdapat suatu hal yang tidak sesuai antara unsur utama dalam pendidikan atau tujuan pendidikan berupa nilai afektif tersebut memang sulit untuk dicapai (Siswoyo et al., 2016).

Penghapusan PSPB menunjukkan bahwa mata pelajaran ini sulit dipertahankan ketika praktik di lapangan tidak sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adanya tumpang tindih materi dengan pelajaran lain, lemahnya pencapaian aspek afektif, serta kritik yang ada menunjukkan bahwa PSPB tidak mampu berjalan efektif dalam struktur kurikulum yang ada. Oleh karena itu, pengintegrasian unsur sejarah dari mata pelajaran PSPB ke dalam mata pelajaran Sejarah dan nilai-nilai ke dalam PKn menjadi pilihan yang dinilai lebih tepat. Keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan berdasarkan landasan

ideologis, tetapi juga oleh kesesuaian materi, metode, dan kemampuan pembelajaran untuk benar-benar membentuk peserta didik.

## KESIMPULAN

PSPB sejak hadir dan dihapuskan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan selalu bergerak dalam tarik-menarik kepentingan politik, ideologi, dan kebutuhan pedagogis. PSPB yang dirancang sebagai instrumen penanaman nilai kebangsaan versi negara tidak selalu berjalan mulus. Pada praktiknya, PSPB justru menghadapi berbagai persoalan, seperti tumpang tindih materi, pendekatan pembelajaran yang tidak sejalan dengan tujuan afektif, hingga kritik dari sejarawan terhadap bias narasi yang terlalu militeristik. Ketika pelaksanaannya tidak mampu memenuhi harapan, PSPB akhirnya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain agar lebih relevan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Pengalaman PSPB pada akhirnya mengingatkan bahwa sebuah mata pelajaran tidak cukup hanya memiliki legitimasi politik dan landasan ideologis. Mata pelajaran juga harus mampu berjalan secara efektif dalam pembelajaran kelas, materi dalam pembelajaran diterima oleh berbagai kalangan, dan memiliki manfaat yang nyata bagi perkembangan peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2009). *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Agung S, L. (2015). *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengan di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daliman, A. (1985). Peranan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam Proses Sosialisasi Nilai-Nilai dan Kepribadian Bangsa. *Cakrawala Pendidikan*, 4(2), 53–64. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/viewFile/7417/pdf>
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). *Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Naredi, H. (2019). PSPB dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru. *Historia: Jurnal Pendidikan Dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20731>
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24–44. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/104343-ID-none.pdf>
- Nury Batubara, U., & Aman, A. (2019). Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 14–34. <https://doi.org/10.21009/jps.081.02>
- Purwanto, B., & Adam, A. W. (2013). *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Semiawan, C. (1983). Fungsi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam Bentuk Manusia Indonesia

- Seutuhnya. *Suara Guru*, 19–21. Retrieved from [https://www.google.co.id/books/edition/Suara\\_guru/w8E4AAAAIAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendidikan+sejarah+perjuangan+bangsa&pg=RA3-PA18&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Suara_guru/w8E4AAAAIAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendidikan+sejarah+perjuangan+bangsa&pg=RA3-PA18&printsec=frontcover)
- Siswoyo, D., Sulistyono, T., Dardiri, A., Rohman, A., Hendrowibowo, L., & Sidharto, S. (2016). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafutra, W. (2016). Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 12(2), 58–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/istoria.v12i2.11056>
- Wibowo, U. B. (2011). Politik dan Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Mencari Pijakan Operasional yang Akuntabel. *Dinamika Pendidikan*, 18(2), 72–86. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamika-pendidikan/article/download/4075/3532>
- Zulkarnain, I. (2013). Pendidikan Indonesia: Dari Hegemoni dan Kuasa Pengetahuan ke Pendangkalan Kemanusiaan. *Society*, 1(1), 56–63. Retrieved from <https://www.societyfisipubb.id/index.php/society/article/view/42>